

informasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, khususnya akses terbatas terhadap DTKS, guna mendukung pengawasan yang objektif dan berbasis bukti.

2. DPRD perlu membangun mekanisme koordinasi rutin berkala dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bank DKI untuk mempercepat pertukaran data, menindaklanjuti rekomendasi pengawasan, serta menyelesaikan persoalan teknis seperti keterlambatan pencairan dan ketidaktepatan sasaran bantuan.
3. DPRD disarankan memperluas kanal pengaduan masyarakat berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem pengawasan DPRD, meningkatkan literasi masyarakat terkait KJP Plus, serta mendorong pengembangan sistem pelaporan penggunaan dana berbasis digital agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hendrik Rosdinar, *Pengawasan Dan Advokasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Yappika-ActionAid, 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muslichah Erma Widiani, *Pengantar Manajemen*, Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada, 2020
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, 2020
- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*, Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta, 2018
- Riyadi, *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2019
- Otom Mustom, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024

Jurnal

- Achmadudin Rajab, "Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota." *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 1-6
- Akhmad Shunhaji, Ahmad Zain Sarnoto, and Iqbal Taufikurrahman. "Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan." *Alim* 1, no. 2 (2019): 251-276.
- Ananda Putra Muluk, et al. "Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di DKI Jakarta." *Ilmu Pemerintahan Unbraw* (2019)
- Ikbal Rachmat, A. Rahman, and Sahira Humaira Sumartono. "Monitoring Dan Evaluasi Program KJP Plus Wilayah Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018." *Jurnal Abdimas* 5, no. 4 (2019): 287-293
- Ina Sophia Kirihio, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam

Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Lex Administratum* 7, no. 1 (2019): 27

Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7 no. 2 (2011): 15-29.

Nanang Suparman, dan Achmad Rozali. "Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 70-83.

Nanang Suparman, dan Achmad Rozali. "Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 1 (2022): 70-83.

Safitri Darmayanty Putri, "Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Di Kecamatan Duren Sawit", Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023, 3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-7432860/cerita-heru-budi-benahi-data-1-juta-kartu-jakarta-pintar-tak-tepat-sasaran> diakses pada tanggal 19 Mei 2025

<https://www.medcom.id/nasional/metro/0kpM61nK-pemprov-dki-perketat-pengawasan-kjp>

<https://www.detik.com/edu/beasiswa/d-7465165/dprd-terima-laporan-soal-penyalahgunaan-kjp-plus-dana-dipakai-kredit-motor>

<https://www.pks-jakarta.or.id/kisruh-pencairan-kjp-plus-dan-kjmu-komisi-e-undang-disdik-thamrin-jangan-gaduh-jelaskan-dan-selesaikan-di-sekolah-masing-masing/>